

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO

Nikadek Putri W. Tirta<sup>1</sup>, Ismet Sulila<sup>2</sup>, Rusli Isa<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

[kadektirta290@gmail.com](mailto:kadektirta290@gmail.com)<sup>1</sup>, [ismet.sulila@gmail.com](mailto:ismet.sulila@gmail.com)<sup>2</sup>, [rusli\\_isa@ung.ac.id](mailto:rusli_isa@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango serta Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan model Miles Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi perencanaannya yang telah menggunakan studi ekologi. Pelaksanaan yang sudah berjalan cukup baik sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Selain itu, adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilaksanakan. Namun, kendala terdapat pada faktor komunikasi dimana masih kurangnya koordinasi dan promosi wisata yang dilakukan. Pengelolaan sumberdaya yang belum maksimal. Serta Disposisi/Sikap Pelaksana dimana permasalahan muncul dari segi masyarakat yang belum memiliki kepatuhan dalam upaya penerapan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele. Adapun pembagian wewenang serta SOP dan CSR pariwisata sudah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: **Implementasi; Kebijakan; Pengembangan Kepariwisataan**

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to find out and describe Implementation of Tourism Development Policies in Olele Village, Bone Bolango Regency and the Factors that influence the Implementation of Tourism Development Policies. The research method used is descriptive qualitative, using data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The data analysis technique uses the Miles Huberman model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study found that the Implementation of Tourism Development Policies in Olele Village, Bone Bolango Regency, has been going well in terms of planning which has used ecological studies. The implementation has been running quite well in accordance with the planning. The Regular monitoring and evaluation is carried out. However, in its implementation there are still several obstacles. The obstacle lies in the communication factor where there is still a lack of coordination and tourism promotion. Insufficient resource management. As well as the Disposition or the implementor behavior where problems arise from community who do not yet have compliance in the effort to implement tourism development policies in Olele Village. However, the distribution of authority and tourism CSR also the SOP has been carried out properly.*

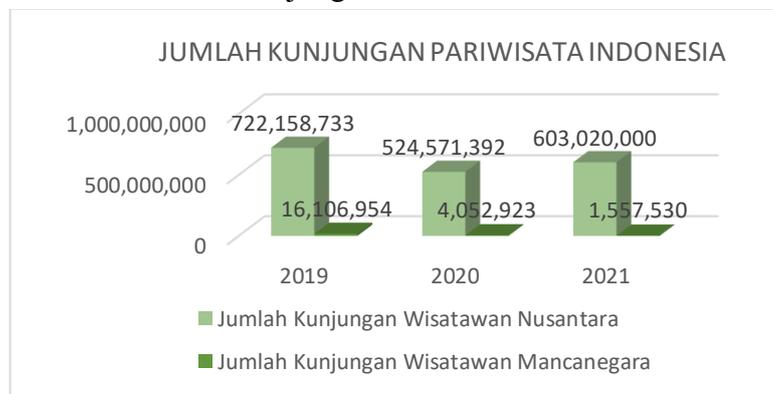
**Keywords: Implementation; Policy; Tourism Development**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan letak geografis yang sangat strategis. Hal ini menjadikan negara Indonesia memiliki potensi pariwisata dari melimpahnya kekayaan alam, keunikan budaya, dan keanekaragaman geologi yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Terletak di ring of fire, Indonesia dikelilingi oleh gunung merapi yang menjadi ciri dari negri seribu pulau ini. Keberagaman serta keunikan alam Indonesia menjadi daya tarik wisatawan yang cukup populer di dunia. Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 (4), menyebutkan bahwa kepariwisataan merupakan kegiatan-kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin serta muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara juga interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan atau pengembangan kepariwisataan tidak hanya pada pariwisatanya saja, tetapi juga aspek-aspek yang mempengaruhi pariwisata tersebut.

Adapun diagram yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ataupun mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia pada Gambar 1.1 di bawah ini:

**Gambar 1.1** Jumlah Kunjungan Pariwisata di Indonesia 2019-2021



*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa pelaksanaan aktivitas kepariwisataan mulai kembali dibangun setelah adanya kemerosotan yang cukup besar pada tahun 2020. Terjadinya musibah Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pembatasan sosial yang terjadi secara besar sehingga menyebabkan terbatasnya kegiatan mobilitas masyarakat. Hal ini berimbas pada kelesuan sektor pariwisata karena tidak adanya pemasukan ekonomi dari usaha-usaha penopang pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan restoran yang mengandalkan kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Maka dari itu, pengembangan kepariwisataan penting untuk dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas mengingat hal ini berkaitan dengan pembangunan wilayah

dan tidak bisa lepas dari kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan di masa mendatang.

Provinsi Gorontalo mempunyai keragaman alam yang melimpah dan otentik. Indahnnya pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari wilayah pesisir dengan sejuta potensi alam yang bisa dikembangkan menjadi wisata idaman. Destinasi wisata pesisir kini banyak diminati karena semakin meningkatnya peminat olahraga *diving&snorkling*. Di Provinsi Gorontalo, salah satu daerah yang memiliki objek wisata bahari ini sebagian besar berada di Kabupaten Bone Bolango. Pengelolaan objek wisata yang ada di Bone Bolango menjadi salah satu perhatian pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bone Bolango bahwa jumlah kunjungan wisata Bone Bolango tahun 2020 yakni 303.247 jiwa, tahun 2021 yakni 275.816 jiwa, sementara itu pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat yakni pada angka 459.449 jiwa. Hal ini tidak menurunkan semangat pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango. Maka dari itu, pembangunan pariwisata Bone Bolango menjadi salah satu indikator yang menjadi fokus pemerintah, karena pariwisata juga termasuk salah satu dari delapan fokus kebijakan Bone Bolango dalam RPJMD 2021-2026.

Arah pengembangan pariwisata khususnya pada kepariwisataan di Bone Bolango tercantum dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango no 2 tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Bone Bolango 2011-2031*. RIPPDA ditujukan sebagai arah atau pedoman dalam aspek kegiatan pariwisata Bone Bolango untuk dikembangkan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan ekologi, rasa nasionalisme, pengembangan ekonomi masyarakat, pemaksimalan kinerja pengembangan pariwisata daerah juga pada pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu destinasi wisata yang menjadi sasaran penyelenggaraan kebijakan ini adalah destinasi wisata Taman Laut Olele, Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango.

Kebijakan pengembangan pariwisata pada umumnya senantiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya dalam mendukung implementasi kebijakan. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Abdussamad dan Hurudji (2022) dengan objek yang diteliti mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yang dipublikasikan pada *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo. Volume IX Nomor 2, 2022*. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa berhasilnya implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, sumberdaya yang memadai, sikap dan komitmen pelaksana yang ideal dan struktur birokrasi yang fleksibel.

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Bone Bolango harus didukung oleh hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaannya di destinasi wisata yang ada. Taman Laut Olele menjadi salah satu primadona pariwisata yang ada di Bone Bolango yang layak mendapatkan pengakuan secara internasional. Objek wisata ini terletak di Desa Olele. Potensi dari Desa Olele ini merupakan destinasi wisata yang menjadi objek wisata favorit khususnya dalam melakukan olahraga *diving & snorkling*. Sebagai suatu kawasan yang terkenal dengan wisata bahari atau kawasan konservasi laut, Taman laut Olele tentunya harus menetapkan regulasi yang ketat untuk masyarakat ataupun pengunjung. Kelestarian lingkungan terutama terumbu karang yang ada di dasar laut olele harus tetap terjaga sehingga diperlukan pemahaman oleh pengunjung ataupun masyarakat mengenai upaya konservasi untuk menjaga ekosistem laut secara lebih luas.

Kenyataan yang terlihat secara langsung di destinasi wisata Desa Olele menunjukkan bahwa masih banyaknya kekurangan serta kendala yang terjadi. Dimulai dari belum adanya peraturan desa mengenai pengelolaan atau pengembangan objek wisata Olele, belum berjalannya retribusi dari tiket masuk ataupun parkir, kondisi lingkungan kawasan pariwisata yang kurang bersih dan terawat, infrastruktur akses jalan masuk yang masih kurang memadai, akomodasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum maksimal, usaha pariwisata yang masih kurang, minimnya pengembangan dan promosi produk UMKM khas Desa Olele serta tidak adanya korelasi antara instansi pemerintah daerah ataupun desa dan masyarakat setempat terkait dengan program pengembangan objek wisata.

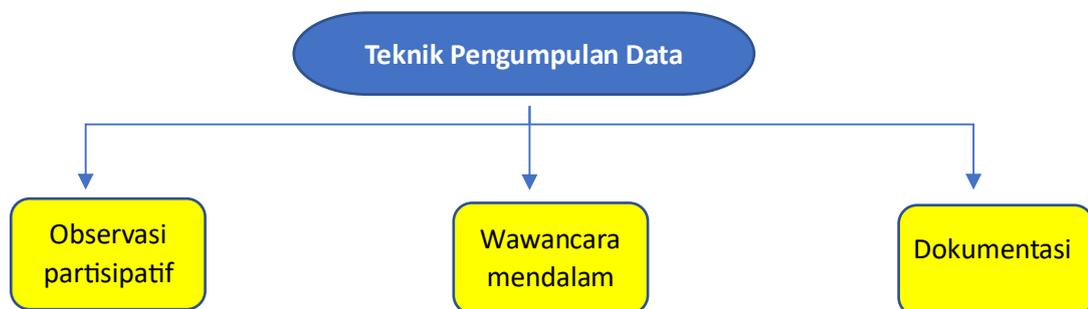
Olele merupakan destinasi wisata berbasis masyarakat. Namun, sebagian masyarakat yang berada di lingkup objek wisata yang akan mengelola langsung kawasan pariwisata belum memiliki cukup kompetensi dalam upaya pengembangan pariwisata serta pelestarian lingkungan. Eksistensi dan popularitas dari wisata Olele yang sering menjadi ikon pariwisata Provinsi Gorontalo ini belum bisa dikelola dan dikembangkan secara optimal oleh pemerintah untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap pengembangan pariwisata di Desa Olele.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan 1) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Desa Olele, yang dikaji dari: a) Perencanaan, b) Pelaksanaan, dan c) Monitoring dan Evaluasi, serta 2) faktor penentu Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango, yang dikaji dari: a) Komunikasi, b) Sumber Daya, c) Disposisi, dan d) Struktur Birokrasi

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang penelitian yang diteliti. Meleong (dalam Hanapi 2017:45) mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Responden yang akan diwawancarai yaitu Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolago, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolago, Aparat Desa Olele, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Pelaku Usaha Pariwisata, dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari literatur, dokumen, serta laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik pengumpulan data Triangulasi (Abdussamad, 2021:142). Seperti pada Gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1** Teknik Triangulasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dikutip oleh (Sugiyono, 2018) yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-April 2023.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bone Bolango merupakan satu dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan *UU No 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupate Bone Bolango dan Kabupatn Pohuwato*. Kabupaten Bone Bolango memiliki yakni sekitar 1.915,44 km<sup>2</sup> dimana pada tahun ini telah

memiliki 18 Kecamatan yang tersebar dipenjuru Bone Bolango. Desa Olele ialah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Dilihat dari segi sejarah, awalnya Desa Olele merupakan bagian dari Desa Oluhuta, namun akhirnya ditetapkan menjadi sebuah desa pada tahun 2004. Desa Olele memiliki wisata yang menjadi ikon pariwisata khas Desa Olele yang terkenal dengan nama Taman Laut Olele. Taman Laut Olele bertempat di dalam pantai di Desa Olele yang memiliki keunikan dan keragaman alam yang tidak sering dijumpai pada destinasi wisata lainnya. Terumbu karang, biota laut, rumput laut yang indah dan masih asli tanpa sentuhan modernisasi dari masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi pesona tersendiri kepada turis nusantara maupun domestik untuk mencoba sensasi berwisata yang baru yakni *Snorkling* dan *Diving*. Untuk mengoptimalkan serta meningkatkan upaya pengembangan kepariwisataan di Desa Olele maka harus dilandasi atas regulasi tentang kepariwisataan. Berikut uraian hasil penelitian serta pembahasan tentang implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango

### **Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango**

Kebijakan pengembangan kepariwisataan yang tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah Kabupaten Bone Bolango dibentuk untuk menjadi landasan dalam upaya pengembangan kepariwisataan. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kepariwisataan yang optimal, berikut strategi implementasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh Kadji (2008):

**Tahap perencanaan** merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango. Gee (dalam Suardana 2013: 11) menyatakan yakni perencanaan dalam regulasi kepariwisataan menjadi suatu keharusan yang bersifat esensial serta harus dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki misi untuk mengembangkan dan melestarikan pariwisata sebagai bagian penting dalam meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam hal perencanaan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele dilakukan dengan menganalisis lingkungan yakni dengan melaksanakan studi mengenai dampak lingkungan yang disebut dengan Studi AMDAL. Maka dari itu, pemerintah daerah juga melakukan sistem zonasi yang ada di bawah laut sehingganya keragaman terumbu-terumbu karang serta mahluk atau ekosistem lainnya yang ada di perairan Olele dapat terjaga. Aspek lingkungan yang dilakukan dalam perencanaan berdasarkan konsep berkelanjutan yang terkandung dalam SDGs/TPB. Tui dan Ilato (2022:333) mengemukakan bahwa dengan menerapkan konsep SDGs di desa maka akan mendukung pengembangan dan

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan sehingga membentuk kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat desa. Pengembangan kepariwisataan penting untuk mengutamakan keselamatan ekosistem sehingga pengelolaan wisata tersebut dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele pada dasarnya sudah berjalan baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Obot dan Setyawan (2017), bahwa dalam perencanaan suatu pembangunan pariwisata diperlukan studi terkait izin pembangunan objek wisata yang berlandaskan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan pariwisata yang berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

**Tahap pelaksanaan** dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang ditunjukkan dengan melakukan serangkaian kegiatan, kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang tertera dalam kebijakan. Pelaksanaan pengembangan kepariwisataan telah tercantum dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Bine Bolango 2011-2031. Kebijakan ini memuat terkait bagaimana suatu pengembangan kepariwisataan dilaksanakan, dimana hal ini tertulis dalam pasal 7 (2) dalam RIPPDA yakni kebijakan pengembangan kepariwisataan dilandasi atas prinsip pariwisata yang berkesinambungan serta secara ekologis memperhatikan berbagai aspek antara lain perekonomian, etika dan sosial masyarakat. Kemudian pengembangan kepariwisataan didasarkan pada kepentingan ilmu pengetahuan dan sosial budaya, aspek keamanan dan kebersihan lingkungan serta keterpaduan program pengembangan lintas sektoral.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele bahwa dari segi ekonomi penerapan kebijakan pengembangan kepariwisataan ini hanya berdampak pada sebagian masyarakat saja yang memiliki usaha atau layanan terkait kegiatan wisata. Pemerintah telah berupaya dalam mendukung ekonomi masyarakat melalui pemberian fasilitas usaha pariwisata, namun berdasarkan hasil temuan lapangan ditemukan bahwa masyarakat belum cukup mampu dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Selain itu, dari segi pendidikan dan sosial budaya masyarakat bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat adalah dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan wisata serta masyarakat tetap menjaga budaya asli desa yang telah ada sejak dulu kala. Dari segi keamanan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan *snorkling* dan *diving* telah memiliki memiliki aturan khusus sehingga keamanan dalam melakukan aktifitas tersebut

masih terjaga. Selain itu, telah banyak kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan dari aspek pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun swasta dimana kerjasama ini dilakukan untuk saling mendukung dalam keberhasilan kebijakan pengembangan kepariwisataan ini. Upaya dalam bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dengan pihak Bank Indonesia serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Maka dari itu, upaya pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan ini telah dilakukan dengan baik yakni dengan meningkatkan kompetensi masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi serta masyarakat yang masih memegang erat kearifan lokal yang ada di Desa Olele. Serta sudah adanya peraturan khusus terkait pelaksanaan kegiatan *snorkling & diving*. Pelaksanaan ini didukung dengan upaya kerjasama lintas sektoral dari berbagai pihak. Namun dari segi ekonomi masih perlu untuk distabilkan kembali sehingga esensi dari tujuan pariwisata yang berkelanjutan bisa tercapai. Jadi dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele telah berjalan dengan cukup baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pujiningrum (2018), bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu harus didukung oleh upaya pemerintah dalam hal dengan memberikan program dan peningkatan keterampilan masyarakat dan pemandu wisata lokal (POKDARWIS). Untuk mendukung hal tersebut, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata adalah dengan mengelola dan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah sehingganya bisa berkontribusi maksimal terhadap peningkatan aspek ekonomi kemasyarakatan.

**Tahap Monitoring dan Evaluasi** dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan telah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tersusun dalam perencanaan. Pujiningrum (2018), bahwa pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring sarana prasarana pariwisata dimana hal ini merupakan bantuan dari pihak pemerintah, monitoring atas program serta pengawasan tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Dalam hal upaya keberlanjutan program maka dibutuhkan evaluasi (Sulila, Wolok, & Pakaya, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa monitoring (pengawasan) dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku yakni pada RIPPDA Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 pada pasal 35. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahgara Kabupaten Bone Bolango bersama kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Olele. Upaya dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan adanya laporan rutin terkait aktivitas pariwisata, inspeksi langsung di lapangan serta melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi

pengembangan kepariwisataan di Desa Olele yang dilakukan oleh para pemegang kepentingan dalam hal ini pemerintah, perangkat desa, masyarakat serta *stakeholder*. Namun, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan upaya dalam melakukan evaluasi dan pengawasan pada fasilitas-fasilitas yang ada.

Jadi dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa monitoring (pengawasan) dan evaluasi terkait kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan cukup baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiarmo (2018), bahwa monitoring dan evaluasi mempengaruhi pelaksanaan ekowisata. Upaya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi adalah melalui dua cara yakni secara internal serta eksternal. Secara internal, monitoring dilaksanakan oleh pengelola wisata itu sendiri, selain itu secara eksternal dilaksanakan oleh pihak luar contohnya penduduk setempat, pemerintah, LSM serta lembaga independen lainnya.

#### **Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango**

Kebijakan pengembangan kepariwisataan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan sesuai dengan regulasi terkait kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango perlu dioptimalkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yakni:

**Komunikasi** yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele terdiri atas koordinasi antara pemerintah, perangkat daerah, serta masyarakat dalam hal ini termasuk kelompok sadar wisata. Selain itu, komunikasi dalam bentuk promosi pariwisata juga sangat perlu untuk dilakukan terhadap upaya penyebarluasan informasi dan marketing untuk pemasaran objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang terjadi yakni miskomunikasi mengenai wilayah kewenangan pemerintah dengan wilayah kewenangan kabupaten sehingganya hal tersebut menjadi salah satu kendala pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi terkait pengembangan kepariwisataan di Desa Olele. Selain itu, dalam hal promosi pariwisata masih dilakukan secara mandiri oleh promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang melibatkan POKDARWIS.

Pengelola wisata dalam hal ini masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan pengelola wisata di destinasi wisata lain dengan tujuan agar informasi terkait destinasi wisata Olele

dapat dilakukan secara meluas. Secara tidak langsung, kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan promosi wisata. Adapun data jumlah kunjungan di destinasi wisata Olele dari tahun 2020-2022, antara lain:

**Tabel 3.1** Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Destinasi Wisata Olele (2020-2022)

Wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik		
	2020	2021	2022
M mancanegara	50	0	225
Domestik	20.327	18.621	6.711
Jumlah	20.377	18.621	6.936

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Bone Bolango*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka kunjungan wisatawan pada tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maka dari itu, promosi wisata harus dioptimalkan untuk menjangkau ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata khususnya Taman Laut Olele. Sulila (2023:376) mengemukakan bahwa komunikasi yakni dalam hal informasi program dan anggaran desa yang efektif dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang efektif pula. Munculnya perspektif negatif masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kepariwisataan adalah karena komunikasi dan informasi yang belum jelas untuk diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisata di Olele adalah karena kurangnya promosi wisata yang dilakukan. Pengelola wisata dalam hal ini masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan pengelola wisata di destinasi wisata lain dengan tujuan agar informasi terkait destinasi wisata Olele dapat dilakukan secara meluas. Secara tidak langsung, kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan promosi wisata. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan maksimal.

**Sumberdaya** dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya sarana prasarana, serta sumberdaya anggaran. Edward III (dalam Tahir, 2014:66-67) mengemukakan bahwa faktor sumber daya turun andil dalam proses implementasi kebijakan, karena betapapun jelas serta koherennya aturan kebijakan atau regulasi yang diatur, ketika tidak dimbangi oleh sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah belum mampu dikelola oleh sumberdaya manusia yang ada. Selain itu minimnya anggaran untuk

pariwisata menjadi salah satu hambatan dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan di Desa Olele. Pemanfaatan sumber daya fasilitas yang baik harus diiringi oleh sumber daya manusia yang dalam hal ini pengelola wisata yang berkompeten. Kompetensi pengelola wisata dalam mengoptimalkan fasilitas penunjang usaha pariwisata di Desa Olele sangat mempengaruhi keberlangsungan dari pemanfaatan fasilitas yang ada, sehingga fasilitas yang diberikan dapat berdaya guna dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Olele. Jadi dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango masih belum memadai. Sumber daya manusia, anggaran, ataupun fasilitas sarana prasarana yang ada di Desa Olele belum bisa menekan perkembangan pariwisata Olele untuk lebih maksimal.

**Disposisi (Sikap Pelaksana)** dalam implementasi kebijakan mencakup antara lain karakter yang dimiliki oleh implementor dari segi kejujuran, komitmen serta demokratis. Menurut Handoyo (2012) Komitmen (Disposition) berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sikap pelaksana dalam hal ini masyarakat dan pengelola wisata cenderung menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan yang akan diterapkan. Selain itu, tidak adanya regulasi desa yang khusus mengatur tentang pariwisata menjadi salah satu faktor dibalik masyarakat yang belum bisa kooperatif dengan pelaksanaan kebijakan ini. Kemudian, pengelola wisata cenderung hanya berfokus pada pengembangan obyek wisatanya yang dalam hal ini adalah *snorkling dan diving*, sedangkan sesuai dengan yang tertera dalam kebijakan pariwisata bahwasanya pengembangan kepariwisataan juga mencakup usaha-usaha pariwisata di dalamnya. Isa (2022:261) mengemukakan bahwa sifat wisausaha memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pengelola usaha dalam menangani resiko terhadap perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut didukung oleh upaya jejaring sosial sebagai strategi bisnis yang dilakukan antara dua kelompok atau lebih. Untuk meningkatkan pendapatan desa maupun PAD tentu harus didukung oleh pemasukan yang bersumber dari usaha masyarakat di desa itu sendiri. Masyarakat sebagai pengelola wisata memiliki tanggungjawab dalam menjalankan usaha pariwisata yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor disposisi/sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik..

**Struktur Birokrasi** dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan, terdiri atas pembagian kewenangan (tupoksi kerja), SOP (Standar Operasional Prosedur) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Berdasarkan

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam hal ini tupoksi kerja, SOP dan CSR telah berjalan dengan baik. Tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah memberikan intervensi pada bagian wilayah kewenangan daerah. Selain itu, POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dibentuk dengan tugas untuk menjadi pengelola wisata yang berasal dari masyarakat. SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah terdapat pada pelaksanaan aktivitas *snorkling* dan *diving*.

Upaya pengembangan kepariwisataan harus didukung dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) wisata. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak eksternal bisa menjadi akses yang memberikan solusi dalam upaya implementasi kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulila, Isa dan Latore (2014) bahwa dalam upaya pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang optimal, pemerintah harus mampu meningkatkan harmonisasi jejaring sosial. Maka dari itu, kerjasama dalam melakukan pembangunan daerah akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan suatu pembangunan.

Jadi dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan hasil penelitian terkait faktor yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan ini sejalan dengan temuan Silvia (2019) bahwa implementasi kebijakan pengembangan wisata adalah upaya dan proses dengan tujuan untuk mengembangkan suatu hal yang sebelumnya belum ada menjadi sesuatu yang sudah lebih baik dan berdaya fungsi tinggi. Upaya tersebut mencakup, Pertama, memperkuat komunikasi dengan memaksimalkan sosialisasi secara terpadu dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia guna mengoptimalkan fasilitas serta anggaran. Ketiga, menciptakan harmonisasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Terakhir, pemetaan tugas dan fungsi yang jelas serta pemanfaatan CSR wisata dan SOP yang sesuai dengan program kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang berhasil adalah ketika kebijakan tersebut diikuti oleh komunikasi yang harmonis, pemanfaatan sumberdaya yang optimal, sikap dan komitmen pelaksana serta struktur birokrasi yang ideal dan fleksibel.

#### **SIMPULAN**

Implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik. Dimana perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dilakukan berlandaskan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031. Namun, dampak perekonomian masyarakat masih belum merata dalam pemanfaatan

pengembangan kepariwisataan ini sehingga hal ini masih menjadi perhatian pemerintah dalam menggali solusinya. Pada fokus terkait faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele belum berjalan dengan optimal. Komunikasi yang terjalin dalam hal ini koordinasi dan promosi wisata belum bisa dikelola dengan baik. Belum maksimalnya pengelolaan sumberdaya yang ada di Desa Olele meliputi sumberdaya manusia, fasilitas dan anggaran. Dari segi Disposisi/Sikap Pelaksana, masyarakat sebagai pengelola wisata belum memiliki komitmen yang cukup serta sifat kewirausahaan untuk mengelola objek wisata Olele sehingga berdaya jual. Namun, dilihat dari faktor struktur birokrasi bahwa implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari tupoksi kewenangan yang sudah jelas, adanya SOP serta CSR pariwisata yang telah dilakukan.

Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pengelola wisata Olele tentang kebijakan pengembangan kepariwisataan hal ini dengan melakukan sosialisasi yang lebih maksimal oleh Pemerintah daerah Bone Bolango kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan sebuah regulasi khusus yang mengatur terkait kepariwisataan di Desa Olele serta perlunya niat dan peningkatan kompetensi masyarakat serta POKDARWIS Desa Olele dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Desa Olele. Koordinasi antara pemerintah daerah Bone Bolango, pemerintah desa Olele, dan masyarakat seharusnya bisa lebih dioptimalkan. Perlu adanya konsep atau rencana strategis dalam melakukan promosi wisata Olele untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal ini perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai, sehingganya diperlukan komitmen pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi serta mengelola sumberdaya yang ada. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa melakukan penelitian terkait kebijakan pengembangan kepariwisataan dengan variabel dan indikator lainnya sehingga optimalisasi tugas dan fungsi pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat dalam mengelola pariwisata bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abdussamad, J., & Hurudji, W. P. A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(2), 157-178.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*.
- ISA, R. (2022). Pengaruh Kompetensi, Budaya Organisasi Dan Perilaku Wirausaha Terhadap Kinerja Bumdes Di Kabupaten Gorontalo. Disertasi, 1(7602141010).

- Pujiningrum Palimbunga, I. (2018). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Tabalansu, Papua. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05, 193. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p10>
- Silvia, D., & Barat, C. J. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6, 2-4.
- Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. In *Seminar Nasional: Unud*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulila, I., Isa, R., & Latare, S. Harmonisasi Jaringan Sosial Sebagai Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelayanan Publik Di Kabupaten Boalemo.
- Sulila, I., Wolok, T., & Pakaya, A. R. (2019). Implementasi Iptek untuk Standardisasi, Pemasaran, dan Distribusi Produk Kerajinan Sulaman Kain Karawo bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 61–70. <https://doi.org/10.30653/002.201941.119>
- Sutiarso, M. A. (2018). Sustainable Tourism Development Through Ecotourism. *OSFPreprint, September*, 1–11.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 978–979.
- Tui, F. P., & Ilato, R. (n.d.). *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Penguatan Potensi Kelembagaan Desa Menuju Percepatan Pencapaian Pembangunan Desa Berkelanjutan Abstrak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) menurut Bappena*. 331–347.
- Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 113–120. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1469>
- Y. Kadji, *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*. Tulung Agung Jawa Timur: Cahaya Abadi, 2008.